

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SURAT PERINTAH
PERJALANAN DINAS (SPPD) DI INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh:
ARNA ANIDA
NIM. 07011182025006**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
MARET 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SURAT PERINTAH
PERJALANAN DINAS (SPPD) DI INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

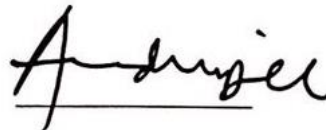
Oleh:

**ARNA ANIDA
NIM. 07011182025006**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 7 Maret 2024

Pembimbing

**Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001**



Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Oleh:

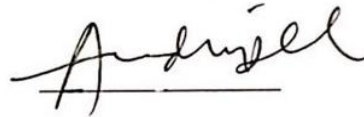
ARNA ANIDA
NIM. 07011182025006

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada 25 Maret 2024

Pembimbing:

Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001

Tanda Tangan

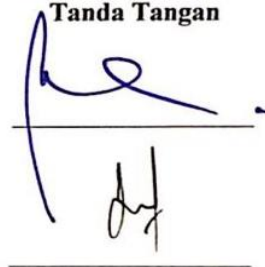


Penguji:

1. Junaidi, S.IP., M.Si.
NIP. 197603092008021009

2. Lisa Mandasari, S.IP., M.Si.
NIP. 198603272023212029

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004



Ketua Jurusan
Administrasi Publik

Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arna Anida

NIM : 07011182025006

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bersungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, ini benar-benar hasil karya Saya sendiri dan Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengintipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau terdapat pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, Saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada Saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,

Indralaya, 7 Maret 2024



Arna Anida

NIM. 07011182025006

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jika tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, setidaknya bermanfaat bagi diri sendiri”

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Orang tua saya, Yusevi dan Alhabrin (alm)
3. Adik saya, Neri dan Alvi
4. Mamang saya, Hendra
5. Keluarga besar saya
6. Dosen Pembimbing saya
7. Pacar saya
8. Teman Seperjuangan
9. Almamater Kebanggan

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Arna Anida 07011182025006

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera sering dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks terkait pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang berfokus pada laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan pengawasan anggaran dinas kendala tersebut berakibat pada kinerja pegawai, sehingga hal tersebut perlu adanya perbaikan. Selain itu proses persetujuan SPPD yang rumit, seringkali melibatkan berbagai tahapan persetujuan dan persyaratan, dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dinas pegawai. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki secara mendalam dan analitis mengenai kompleksitas Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Manfaat penelitian ini adalah agar dapat menambah pengetahuan, pemahaman serta wawasan dalam lingkup bidang studi pemerintahan, manajemen dan administrasi publik. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk memberikan perbaikan dalam proses pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja organisasi kedepannya.

Kata Kunci: SPPD, Pergub, SOP, Akuntabilitas

Pembimbing

Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001



Indralaya, 7 Maret 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001



ABSTRACT

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Arna Anida 07011182025006

The Sumatera Provincial District Inspectorate is often faced with a number of complex challenges related to the management of the Service Travel Orders (SPPD) which focus on the reporting of service travel accountability and the oversight of the budget of the service, resulting in the performance of the officers, so it needs to be improved. In addition, the complicated SPPD approval process, often involving various stages of agreement and conditions, can impede the smooth execution of official duties. The objective of this research is to investigate in depth and analytically the complexity of the Management of Service Travel Orders (SPPD) in the Regional Inspectorate of South Sumatra Province, which guides the Government of South Sumatera Governor's Regulation No. 5 Year 2021 on the Guidelines for the Implementation of the Service Travel in the Environment of the Governor of South sumatra Province using qualitative research methods. The benefit of this research is that it can add knowledge, understanding and insight in the scope of studies of government, management and public administration. As for the results of this research, it is to provide improvements in the process of managing the Service Travel Order Letter (SPPD) as long as it can improve the performance of the staff and the future organizational performance.

Keywords: SPPD, Pergub, SOP, Accountability

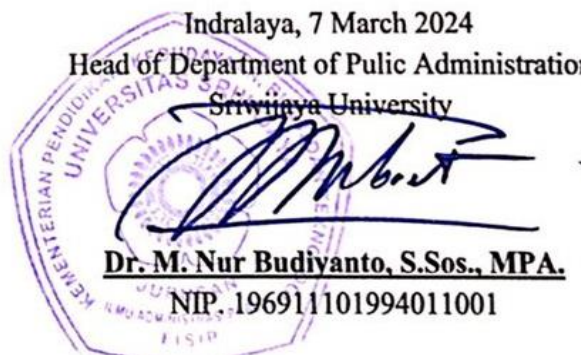
Advisor

Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001



Indralaya, 7 March 2024

Head of Department of Pulic Administration
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam melaksanakan Penelitian ini, penulis menyadari banyak memperoleh dukungan, bimbingan dan kontribusi dalam proses penyelesaian laporan ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua, Yusevi terimakasih sudah menjadi ibu terbaik dan tidak pernah menuntut saya menjadi yang sempurna. Terimakasih untuk semuanya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.SI. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan terkait proses penyusunan Skripsi.
7. Terimakasih kepada mamang Endah yang selalu memberikan uang kepada saya
8. Terimakasih Kepada Neri Mariani dan M. Alvi Tri Saputra selaku adik saya terimakasih sudah selalu support dan menghargai apapun keputusan saya.
9. Terimakasih kepada Achmad Dendy Saputra selaku pacar saya, Terimakasih sudah menemani saya dan support saya sampai titik ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Staff dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah membantu memperlancarkan proses Penyusunan Skripsi.
11. Pembimbing teknis dan seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah banyak membantu dan memberikan pengalaman berharga kepada penulis.
12. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu ikut serta membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama Penelitian hingga penyelesaian skripsi.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan di Bidang Administrasi Publik dan Pengelolaan Perjalanan Dinas.

Indralaya, 7 Maret 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arna Anida', with a stylized, cursive script.

Arna Anida

NIM. 07011182025006

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Good Governance.....	11
2.2.1 Definisi Good Governance	11
2.2.2 Prinsip-prinsip Good Governance	12
2.3 Akuntabilitas	13
2.3.1 Definisi Akuntabilitas.....	13
2.3.2 Tujuan Akuntabilitas	15
2.3.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas.....	17
2.3.4 Faktor-faktor menunjang kendala akuntabilitas	18
2.3.5 Dimensi atau Ukuran Akuntabilitas Publik.....	19
2.4 Konsep Surat Perintah Perjalanan Dinas.....	20
2.4.1 Pengertian Surat Perintah Perjalanan Dinas	20
2.4.2 Jenis dan Konsep Biaya Perjalanan Dinas.....	20

2.4.3	Penerbitan Surat Tugas	23
2.4.4	Penerbitan Surat Perjalanan Dinas	23
2.4.5	Pelaksanaan Perjalanan Dinas	24
2.5	Pelaporan dan Pengawasan Anggaran Dinas	26
2.5.1	Pelaporan Perjalanan Dinas	26
2.5.2	Pengawasan Anggaran Dinas	27
2.5.3	Indikator Pengawasan Internal	27
2.6	Teori Akuntabilitas	28
2.6.1	Teori Ellwood dalam Banga (2017:135)	28
2.6.2	Solihin dalam Bana (2017:138)	29
2.6.3	Mardiasmo dalam Banga (2017:138)	29
2.6.4	Schater dalam Leonardo (2011:118)	29
2.6.5	Jabra dan Dwivedi dalam Leonardo (2011:120)	30
2.7	Teori Akuntabilitas yang digunakan pada penelitian ini	31
2.8	Kerangka Teori	31
2.8.1	Aktivitas Informasi	32
2.8.2	Aktivitas Tindakan	34
2.8.3	Aktivitas Tanggapan	35
2.9	Kerangka Pemikiran	37
2.10	Penelitian Terdahulu	39
2.11	Hipotesis Deskriptif	50
BAB III	METODE PENELITIAN	51
3.1	Desain Penelitian	51
3.2	Definisi Konsep	51
3.3	Fokus Penelitian	53
3.4	Unit Analisis dan Unit Observasi	55
3.5	Data dan Sumber Data	55
3.5.1	Data	55
3.5.2	Sumber Data	56
3.6	Informan Penelitian	56
3.6.1	Kriteria Informan	56
3.6.2	Key Informan	56

3.7	Teknik Pengumpulan Data	57
3.8	Teknik Keabsahan Data.....	57
3.9	Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		61
4.1	Gambaran Umum	61
4.1.1	Sejarah Singkat Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ...	61
4.1.2	Visi dan Misi Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	63
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	64
4.1.4	Stuktur Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	70
4.2	Deskripsi Informan Penelitian	71
4.3.1	Aktivitas Informasi	73
4.3.2	Aktivitas Tindakan	86
4.3.2.1	Tindakan Terorganisasi	86
4.3.2.2	Tindakan Tidak Terorganisasi.....	88
4.3.3.2	Evaluasi	92
4.4	Pembahasan Penelitian	96
4.5	Faktor-Faktor Mempengaruhi Akuntabilitas	98
BAB V PENUTUP		100
5.1	Kesimpulan.....	100
5.2	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN.....		106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemilihan Judul.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Variabel Fokus Penelitian	53
Tabel 4.1 Komposisi Personil Berdasarkan Alokasi Dan Jenjang Pendidikannya	69
Tabel 4.2 Informan Penelitian.....	71
Tabel 4.3 Relevansi di Kantor Inspektorat.....	74
Tabel 4.4 Reliability di Kantor Inspektorat	78
Tabel 4.5 Dapat Dibandingkan di Kantor Inspektorat	82
Tabel 4.6 Intuitif di Kantor Inspektorat	84
Tabel 4.7 Tindakan Terorganisasi di Kantor Inspektorat.....	86
Tabel 4.8 Tindakan Tidak Terorganisasi di Kantor Inspektorat	88
Tabel 4.9 Pengawasan di Kantor Inspektorat.....	90
Tabel 4.10 Evaluasi di Kantor Inspektorat.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Website Untuk Input Perjalanan Dinas	2
Gambar 1.2 Isi Pergub Sumsel No. 5 Tahun 2021 Bagian Pertanggungjawaban.....	5
Gambar 2.1 Siklus Akuntabilitas Menurut Schater (2000).....	31
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 3.1 Model Interaktif Miles dan Huberman (1992).....	58
Gambar 4.1 Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	61
Gambar 4.2 Tim Pengelola Perjalanan Dinas	76
Gambar 4.3 Bukti Tansaski Biaya Perjalanan Dinas	79
Gambar 4.4 <i>Standar Operasional Prosedur</i> Perjalanan Dinas	85
Gambar 4.5 Format Surat Tugas Perjalanan Dinas	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	106
Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi	108
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	111
Lampiran 4 Surat Balasan Izin Penelitian dari Kantor.....	112
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi	113
Lampiran 6 Validasi Plagiat Skripsi	115
Lampiran 7 Dokumentasi.....	116
Lampiran 8 Form Perbaikan Skripsi	117

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

Akuntabilitas	: Pertanggungjawaban
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<i>Good Governace</i>	: Pemerintah yang Baik
Kasubbag	: Kepala Subbagian
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
Pergub	: Peraturan Gubernur
PPK	: Pejabat Pembuat Komite
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
SPPD	: Surat Perintah Perjalanan Dinas
SPM/SP2D	: Surat Perintah Percairan Dana
SPTJB	: Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
SPTJM	: Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
ST	: Surat Tugas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia yang terus berkembang dengan perubahan yang semakin cepat, terutama di era modern ini yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas sosial, administrasi publik menjadi sebuah arena yang senantiasa bertransformasi. Pemerintah, khususnya di tingkat daerah, menghadapi tantangan yang semakin rumit dalam menjalankan tugasnya. Salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan adalah pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bukan hanya sekadar administrasi perjalanan pegawai, melainkan mencerminkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, menghadapi dinamika pemerintahan daerah yang kompleks. Dalam konteks ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memegang peran vital sebagai lembaga pengawas dan pengendali dalam lingkup pemerintah daerah. Inspektorat bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan dengan efisien, serta memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera sering dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks terkait pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Proses persetujuan SPPD yang rumit, seringkali melibatkan berbagai tahapan persetujuan dan persyaratan, dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dinas pegawai. Selain itu, pelaporan perjalanan dinas

juga menjadi isu kritis. Data yang tidak akurat dalam laporan perjalanan dinas dapat menghasilkan informasi keuangan yang tidak akurat, mengganggu perencanaan anggaran di masa mendatang dan mengurangi transparansi dalam penggunaan dana publik.

Gambar 1.1 Website Untuk Input Perjalanan Dinas

Kantor	No Surat Tugas	Tgl Surat Tugas	Tgl SPPD	Tgl SPPD	Tujuan	Kode Program/Keg	Kode Rekening	Rekening	Nama Program	
plilin	800/00800/ST/ITDAPROV.IV/2023	23-12-2023	23-12-2023	25-12-2023	NOTA LUBUK LINGGAU	0.00.001.006.009	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi
plilin	700/00798/ST/ITDAPROV.VI.2/2023	21-12-2023	22-12-2023	22-12-2023	ilir Timur II	0.00.001.006.009	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi
plilin	700/00798/ST/ITDAPROV.VI.3/2023	13-12-2023	13-12-2023	15-12-2023	YOGYAKARTA	0.00.001.006.009	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi
plilin	700/00796/ST/ITDAPROV.IV/2023	13-12-2023	13-12-2023	15-12-2023	ilir Timur I	8.01.002.002.002	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyediaan
plilin	700/00795/ST/ITDAPROV.VI.3/2023	14-12-2023	14-12-2023	15-12-2023	Kemuning	0.00.001.006.009	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi
plilin	700/00794/ST/ITDAPROV.VI.1/2023	13-12-2023	13-12-2023	15-12-2023	ilir Barat I	8.01.002.001.007	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyediaan
plilin	700/00792/ST/ITDAPROV.IV/2023	12-12-2023	12-12-2023	14-12-2023	KAB. MUARA ENIH	8.01.003.002.001	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendamping
plilin	700/00793/ST/ITDAPROV.IV/2023	12-12-2023	12-12-2023	14-12-2023	KAB. MUARA ENIH	8.01.003.002.001	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendamping
plilin	700/00790/ST/ITDAPROV.VI.3/2023	12-12-2023	12-12-2023	13-12-2023	KAB. BANYUASIN	8.01.003.002.002	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendamping

Sumber: Website Inspektorat 2023

Selain itu penelitian ini memiliki peran strategis dalam mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 16, dengan fokus pada Target 16.5 yang menitikberatkan pada pembatasan korupsi dan praktek suap. Pencapaian Target 16.5 menjadi sangat esensial, terutama dalam konteks pemerintahan daerah di mana integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik memegang peran krusial.

Integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjadi landasan utama untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah penelitian ini berperan dengan memberikan kontribusi konkret dalam upaya pemberantasan korupsi dan praktek suap. Melalui identifikasi, analisis, dan rekomendasi terkait mekanisme pengawasan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),

penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang potensi risiko korupsi yang mungkin muncul.

Dengan memahami kendala-kendala yang dapat menjadi pemicu praktik korupsi, penelitian ini dapat membantu merumuskan strategi preventif yang efektif. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada peningkatan mekanisme pengawasan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tetapi juga dapat mencakup perbaikan dalam kebijakan dan prosedur yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga penelitian ini menjadi sebuah langkah proaktif dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk mencapai target SDG 16.5, yang pada gilirannya diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal dan kontribusi lebih luas terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya sekadar tugas administratif biasa, melainkan juga mencerminkan integritas institusi dan kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien, efektif, dan adil. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan komprehensif mengenai Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sangat penting, dalam Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang menjadi fokusnya yaitu Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dan Pengawasan Anggaran Dinas. Dalam hal ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dan Pengawasan Anggaran Dinas, sehingga dapat diidentifikasi sejauh mana pelaporan ini telah memenuhi standar akuntabilitas atau sebaliknya. Oleh karena itu, penting untuk

memahami betapa signifikan peran laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam dan analitis mengenai kompleksitas Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jika dilihat dari pedoman tersebut pada bagian pelaporan dan pengawasan anggaran dinas, Inspektorat daerah provinsi sumatera selatan belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang ada, hal ini bisa dilihat dengan kurangnya kesadaran pegawai dalam proses laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas hal ini terbukti dari banyaknya laporan pertanggungjawaban yang dikumpul tidak tepat waktu dan masih banyak pegawai yang mengeluh dana perjalanan dinas yang lama cair namun mereka tidak menyadari jika terhambatnya pencairan salah satu faktornya yaitu laporan pertanggungjawaban yang lama dilaporkan dengan kurun waktu yang sudah ditetapkan. Selain itu juga masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memantau anggaran perjalanan dinas yang mengakibatkan kurang transparansi pada saat pelaporan.

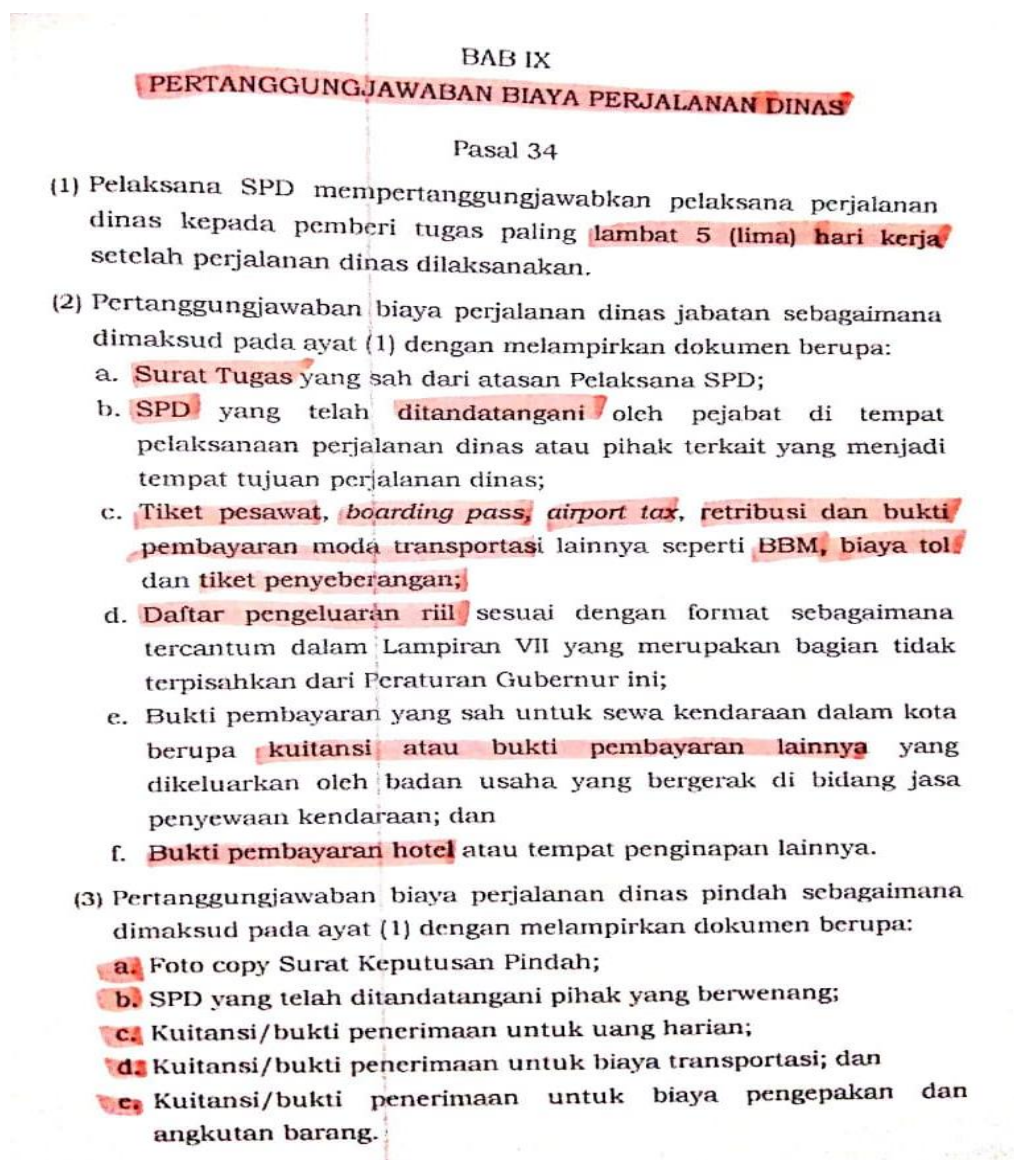
Berikut uraian permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran pegawai dalam mengumpulkan laporan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bab IX tentang Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Pasal 34 disebutkan bahwa pegawai melakukan pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada petugas paling lambat 5 (lima) hari

kerja setelah perjalanan dinas namun nyata implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Gambar 1.2 Isi Pergub Sumsel No. 5 Tahun 2021 Bagian Pertanggungjawaban



Sumber: Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 5 Tahun 2021

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengawasan anggaran dinas

Berdasarkan data di atas masih banyak laporan yang dikumpul secara tidak tepat waktu salah satunya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang bertugas dalam

pengawasan anggaran dinas hal ini menyebabkan masih terdapat kesalahan di bagian laporan anggaran dinas pada saat pelaporan.

Tabel 1.1 Pemilihan Judul

No.	Bentuk Kesadaran	Keterangan
1.	Kurangnya Kesadaran Pegawai dalam pelaporan perjalanan dinas.	Masih sedikit pegawai yang melaporkan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu.
2.	Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan anggaran dinas.	Hanya satu pegawai dibagian pelaksana verifikator perjalanan dinas sehingga kurang efisien dalam pengawasan.

Sumber: Diolah Penulis 2023

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai lembaga pengawas, harus memberikan contoh terbaik dalam tata kelola keuangan publik. Ketika Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dikelola dengan baik, hal ini bukan hanya memberikan kepercayaan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas dinas, tetapi juga menciptakan transparansi yang diperlukan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan sebaik-baiknya, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di latar belakang, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman serta wawasan dalam lingkup bidang studi pemerintahan, manajemen dan administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan internal dalam Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang merancang proses dan prosedur yang lebih efisien, termasuk penyederhanaan proses persetujuan, penggunaan sistem pelaporan yang lebih efisien, dan perubahan dalam pengawasan anggaran. Dengan prosedur yang lebih baik, pemerintah dapat menghemat waktu dan sumber daya, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik, serta memperbaiki kualitas layanan publik.

2. Bagi Masyarakat

Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang lebih efisien berarti dana publik dapat dialokasikan dengan lebih bijaksana. Penghematan yang dihasilkan dari proses administrasi yang lebih efisien dapat diarahkan ke proyek-proyek dan program-program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti layanan kesehatan yang lebih baik, infrastruktur yang memadai, dan pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal

- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fernanda, Desi. 2009. *Etika Organisasi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Handoko, H. 1998. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi kedua*. BBPE, Yogyakarta
- Intiyas Anggi, Ika. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi Whistleblowing Atas Penyalahgunaan Dana*.
- Juliana, Pipit dan Purweni Whidianningrum. 2017. *Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kevamatan Kawedaan Kabupaten Magetan*. Universitas PGRI Madiun, Vo 6 No. 2.
- Kawatu, Freddy Samuel. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Latif, Arsan, dkk. 2019. *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Moenek, Reydonnizar dan Dadang Suwanda. 2019. *Good Government Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Rosda.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif "Edisi Revisi"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Rifqi. 2006. *Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Zakat (Opz) di Daerah Istimewah Yogyakarta*.
- Pabundu, Tika. 2008. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Purnama, I. (2017). *Akuntabilitas Penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas*

(Sppd) Pegawai Di Sekretariat Dprd Kota Makassar.

- Prasetyo, H. 2018. *Penerapan Sistem Informasi SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelayanan di Kantor Perbendaharaan Negara Kota Jambi.* Jurnal Penelitian Manajemen.
- Rahim, Abu. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayam Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser,* (Ejournal Ilmu Pemerintah: 3 (4) 1623-1636 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Rahmat. 2017. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik.* Yogyakarta: Andi.
- Riska, Apriliana. 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance.*
- Schater, Mark. 2000. *When Accountability Fails: A Fremework for Diagnosis and Action Policy Brief No. 9,* Institute On Governence: Canada.
- Simanjuntak, J. Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja.* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Konsep Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik, Edisi Kedua.* Yogyakarta: Graha
- Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya.* Cetak ke-23. Jakarta: Rajawali Pers
- Winardi J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia.* Jakarta

Sumber Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 Tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah